

**MENEROPONG MASA DEPAN KOMUNITAS ASEAN 2015:  
Studi Prediksi atas Komunitas ASEAN di Asia Tenggara**

Sugiarto Pramono<sup>1</sup>

**Abstract**

*In this paper—through four barometers—writer predicts future ASEAN Community 2015. (1) geography, which is shaped continents or islands, (2) ethnicity, homogeneous or hiterogen, (3) the intensity of the war in the past, how often and big? and (4) how much of the political will of key policy makers to create a regional community?. At the end of the article concluded that the ASEAN community 2015, apparently through steep winding road, if not fail.*

*Key words: community, regionality, integration*

## 1. Pendahuluan

Selama tiga hari (23-25 Oktober 2009) para pemimpin Negara-negara ASEAN berkumpul di Hun Hin (Thailand) untuk menyelenggarakan "ritual tahunan", Konferensi Tingkat Tinggi ke-15. Salah satu yang diperbincangkan oleh para *top manager* Negara-negara itu adalah Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*). Gagasan tersebut sebenarnya sudah muncul setidaknya sejak KTT tak resmi ASEAN di Kuala Lumpur 15 Desember 1997, yang kemudian dikenal dengan ASEAN vision 2020.

Ide yang masih bersifat prematur itu kemudian dimatangkan dalam Bali *Concord II (Declaration of ASEAN Concord II)* yang dihasilkan dalam pertemuan puncak ASEAN ke-9, di Pulau Dewata. Para pemimpin ASEAN memproklamkan pembentukan Komunitas ASEAN yang terdiri atas tiga pilar, yaitu: Masyarakat Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community/ ASC*); Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community AEC*); dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Social-Cultural Community/ ASCC*).

Perkembangan selanjutnya, dalam KTT ke 12 ASEAN di Cebu, Filipina pada tanggal 12-13 Januari 2007 telah dicapai sebuah kebijakan strategis, yaitu menargetkan komunitas ASEAN pada 2015, atau mempercepat 5 tahun daripada target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pertanyaannya: **seberapa besar kemungkinan upaya ambisius**

### **para pemimpin ASEAN tersebut dapat terwujud?**

Tulisan ini bersifat prediktif, yakni meneropong masa depan Komunitas ASEAN. Seberapa besar kemungkinan gagasan ini dapat direalisasikan? Apakah setting geografis, sejarah, sosio kultur dan peta kepentingan para pemimpin negara-negara Asia Tenggara memungkinkan terwujudnya gagasan tersebut? Lalu apa yang seyogyanya dilakukan oleh para pemangku kebijakan agar gagasan komunitas ASEAN mewujud?

Berbeda dengan dua kerja ilmiah yang lain, *deskripsi* dan *eksplanasi*, *prediksi* dianggap sebagai kerja yang lebih canggih, karena itu ia lebih sulit, namun tentunya bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Salah satu indikator kematangan suatu disiplin ilmu, termasuk ilmu Hubungan Internasional, adalah kemampuannya dalam membuat prediksi, proyeksi masa depan atau menentukan aneka kemungkinan di masa yang akan datang. Manfaat yang paling nyata dari prediksi yaitu mengontrol masa depan. Bila sudah diketahui aneka kemungkinan yang bakal terjadi, maka hal ini tentu akan sangat membantu para pembuat kebijakan untuk menentukan aneka alternatif kebijakan yang dianggap paling efektif.

#### **a. Konsep Komunitas**

Terdapat beragam pemahaman terhadap komunitas. Para ilmuan seperti Ferdinand Tönnies, Robert D. Putnam, McMillan, Chavis dan masih banyak lainnya memberikan beragam

definisi tentang komunitas dengan penekanan yang beragam.

Smith, M. K. (2001), dengan sangat kreatif telah melakukan eksplorasi terhadap konsep tersebut, menurutnya sedikitnya terdapat 3 cara dalam memahami masyarakat, yaitu: *pertama: place*, memahaminya dari sisi teritorial, tempat, geografis ataupun wilayah, *kedua: interest*, yakni meneropongnya dari kesamaan kepentingan, fokus, minat serta karakteristik umum, selain tempat dan *ketiga: communion*, yakni persekutuan, kelompok, kebersamaan<sup>2</sup>. Secara lebih rinci Smith, menulis:

*Here we will initially explore community in three different ways (after Willmott 1986; Lee and Newby 1983; and Crow and Allen 1995). As: **Place**. Territorial or place community can be seen as where people have something in common, and this shared element is understood geographically. Another way of naming this is as 'locality'. This approach to community has spawned a rich literature – first in 'community studies' and more recently in locality studies (often focusing on spatial divisions of labour); **Interest**. In interest or 'elective' communities people share a common characteristic other than place. They are linked together by factors such as religious belief, sexual orientation, occupation or ethnic origin. In this way we may talk about the 'gay community', the 'Catholic*

*community' or the 'Chinese community'. Development in what might be called the sociology of identity and selfhood have played an important role in 'opening out the conceptual space within which non-place forms of community can be understood' (Hoggett 1997: 7). 'Elective groups' and 'intentional communities' (ranging, according to Hoggett op cit from cyber-communities to car-boot enthusiasts) are a key feature of contemporary life ; **Communion**. In its weakest form we can approach this as a sense of attachment to a place, group or idea (in other words, whether there is a 'spirit of community'). In its strongest form 'communion' entails a profound meeting or encounter – not just with other people, but also with God and creation. One example here would be the Christian communion of saints – the spiritual union between each Christian and Christ (and hence between every Christian). Another is Martin Buber's interest in meeting and 'the between'<sup>3</sup>.*

Di sisi lain Gusfield (1975) mensyaratkan adanya dua dimensi dalam suatu komunitas, yaitu dimensi *teritorial* (kedekatan secara fisik, karena hidup dalam teretori yang sama) dan dimensi *relation* (hubungan)<sup>4</sup>. Kendati secara fisik mereka tidak bertemu, namun ketika terdapat hubungan di antara mereka, maka itu juga, oleh sementara ilmuan, dapat dikategorikan sebagai komunitas, sekelompok ilmuan

<sup>2</sup> Smith, M. K. (2001) 'Community' in the encyclopedia of informal education, <http://www.infed.org/community/community.htm>., diakses pada Senin 2 November 2009, pukul 13:05 WIB.

<sup>3</sup>ibid

<sup>4</sup> Capece, Guendalina *Alt all*. 2009. "Online Communities Serving Territorial Communities: The M8 Case Study". *9th Global Conference on Business & Economics* (October 16-17, 2009 Cambridge University, UK) hal 7.

yang kendati mereka secara fisik berada dalam tempat yang berbeda dan jauh namun ketika terjadi interaksi diantara mereka, kemudian dalam benak mereka terdapat persepsi dan keyakinan bahwa mereka senasip, satu visi, sepenangungan, memiliki kualitas hubungan yang tinggi dan memiliki *interest* yang sama maka itu juga disebut komunitas. Contoh lain yang paling mudah ditunjuk adalah komunitas *blogger* di internet. Dimensi teritorial, mensyaratkan adanya kedekatan dan interaksi secara fisik, sementara dimensi hubungan (*relation*) tidak selamanya demikian. Dalam banyak kasus, kedekatan dan berbagai wilayah tidak dapat dengan sendirinya merupakan suatu komunitas, karena itu dimensi relasional juga sangat esensial<sup>5</sup>.

#### b. Komunitas dalam studi HI

Dalam studi Hubungan Internasional, konsep komunitas sering kali dipinjam guna membantu memahami kerjasama multilateral oleh sejumlah Negara dalam suatu kawasan tertentu. Kendati terkadang terkesan dipaksakan, namun model komunitas harus diakui sangat membantu dalam upaya kita memahami kerjasama multilateral Negara-negara dalam sebuah region.

Hubungan internasional kontemporer diwarnai dengan munculnya aneka pelaku dalam ranah internasional. Tidak hanya aktor konvensional: Negara, bermacam organisasi internasional baik

pemerintah maupun non pemerintah, baik perusahaan multinational maupun beragam kelompok kepentingan dan penekan bahkan individu telah terhubung dalam jejaring yang teramat rumit, kait terkait dengan sangat erat, berjaln berkelindan dengan sangat akut, bahkan saling tergantung satu sama lain. Seting global inilah yang kerap kali disebut sebagai pola :*complex interdependency*<sup>6</sup>.

Selanjutnya *complex interdependency* inilah yang seanalogue dengan konsep komunitas. Tidak hanya dalam tataran teoritis yang dikembangkan oleh para ilmuwan sebagai model, dalam tataran praktis, para pembuat kebijakan (*decision making*) pun berupaya melalui aneka kebijakan yang dibuatnya dengan mendesain, menata, mengelola teretori suatu kawasan sebagai komunitas. Contoh apik adalah the *Concert of Europe* (1815-1853), yang bentuk paling canggihnya adalah Uni Eropa (1992-sekarang).

Sulit dipungkiri bahwa *Concert of Southeast Asian Nation* yang dirumuskan pada *Bali Concord II*

---

<sup>6</sup> Robert Keohane dan Joseph Nye—sebagaimana dikutip oleh Aleksius Jemadu dalam bukunya *Politik Global: dalam Teori dan Praktek* halaman 46—lebih jauh menjelaskan, sedikitnya ada tiga indikasi yang menunjukkan *complex interdependency* sedang beroperasi, yaitu: (1) *multiple chanel*, yakni hubungan dan aneka aksi reaksi yang terjadi dalam lata hubungan internasional berlangsung melalui banyak jalur (*multiple chanel*), tidak lagi hanya G to G (*government to Government*), bahkan hingga tingkat terendah *people to people*, sekeping permasalahan yang dapat ditunjuk adalah jamaah Mujahadah Asmaa ul Husnaa yang memiliki jaringan jamaah hingga manca Negara; (2) *multiple issue*, tidak ada lagi dikotomi *high politic* dan *low politic*, di era perang dingin dikotomi tersebut, *high politic* didominasi oleh isu ketahanan-keamanan, sementara isu seperti HAM, lingkungan, gender, energi dikategorikan dalam *low politic* yang kurang memperoleh perhatian; (3) semakin kecilnya kemungkinan perang digunakan sebagai instrument dalam berhubungan dengan Negara lain.

terilhami oleh the *Concert of Europe*<sup>7</sup>. Kendati demikian, apa yang diupayakan para konseptor komunitas kawasan, bukan tidak didahului oleh seting objektif kawasan yang hendak mereka desain menjadi sebuah komunitas. Diyakini ada kondisi-kondisi objektif yang berperan sangat penting, selain kemauan politik para *decision making* dalam mewujudkan komunitas kawasan, yaitu: seting geografis, seting masyarakat, seting sejarah dan, tentunya, *political will* para pembuat kebijakan.

Sekuat apapun keinginan para pembuat kebijakan untuk mewujudkan tata komunitas kawasan, ketika tidak berada dalam kontek seting objektif yang berpotensi memunculkan komunitas kawasan, maka akan sangat panjang dan terjal jalan menuju komunitas kawasan.

## 2. Pembahasan

Sebagai metode pengelolaan kawasan, model komunitas kawasan, tidak serta merta akan melewati jalan mulus. Ada sejumlah seting atau kondisi obyektif yang diyakini harus ada terlebih dahulu, selain kemauan politik warga Negara dan para pembuat kebijakan tentunya.

Sejumlah seting tersebut dipercaya terdapat di Eropa, sehingga bukan hal yang aneh bila kemudian regional ini tidak hanya mencapai tahap *European Community* (1967) bahkan jauh melampaui itu hingga mentransformasikan diri menjadi

semacam "Negara supranasional", Uni Eropa. Adapun sejumlah seting tersebut, yaitu: Geografis; Kesukuan (keetnisan) dan agama (relegiuitas); intensitas perang di masa lalu; serta yang tak kalah pentingnya ialah seting kemauan politik para rezim domestik di suatu regional untuk membentuk komunitas regional, seting terakhir diyakini memerankan peran kunci.

### a. Geografis

Seting Geografis tak pelak memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap aneka pola pilihan politik masyarakat yang menempatnya. Apakah seting geografis itu berupa bumi yang subur, tanah yang mengandung minyak dan kekayaan alam lainnya, areal yang tandus, gurun pasir, bergunung-gunung, berbentuk kepulauan (nusantara) atau bahkan daratan luas (benua).

Areal yang mengandung energi misalnya, selalu akan menjadi rebutan bangsa-bangsa lain, lihat saja Timur Tengah yang memiliki kandungan minyak lebih dari separoh kandungan minyak dunia. Bahkan korelasi Georafis dan politik memunculkan disiplin tersendiri yaitu, Geopolitik.

Secara georafis Asia Tenggara, dapat diklasifikasikan menjadi dua areal besar, yaitu: Asia tenggara daratan (ATD) yang lazim disebut indocina, seperti Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar dan Thailand dan Asia Tenggara Maritim (ATM) yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunai, Filipina dan Timur Leste. Dengan seting geografis seperti ini

---

<sup>7</sup> Ibid, Luhulima, hal 31.

maka transformasi manusia tidak akan semudah, misalnya, jika dibandingkan dengan transformasi manusia di daratan Eropa. Seting geografis seperti ini, secara kasat mata memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap sulitnya proses integrasi di Asia Tenggara, yang tentunya juga menghambat terciptanya komunitas ASEAN.

#### **b. Etnisitas dan Religiuitas**

Seting sosiokultur masyarakat Asia Tenggara yang menempati 11 daerah teretori, termasuk Timur Leste—kendati belum menjadi anggota ASEAN—merupakan masyarakat yang sangat majemuk, tidak hanya dalam etnis, namun juga agama, ideologi dan keyakinannya sangat beragam. Di Kamboja ada suku Khmer, Tionghoa, suku Vietnam, Cham; di Laos ada suku Lao, Lao Theung, Lao Soung; di Myanmar ada suku Burma, Shan, Karen, Rakhine; belum lagi di Indonesia, Malaysia dan yang lain.

Demikian pula agama di kawasan ini, begitu majemuk. Agama Buddha menjadi mayoritas di Thailand, Myanmar, dan Laos serta Vietnam dan Kamboja. Agama Islam dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Agama Kristen menjadi mayoritas di Filipina. Di Singapura, agama dengan pemeluk terbanyak adalah agama yang dianut oleh orang Tionghoa seperti Buddha, Taoisme, dan Konfusianisme. Belum lagi budaya yang hidup beriringan dengan mereka. Tidak hanya sangat beraneka bentuknya namun juga sering sekali berkarakter egosentrisme.

Kemajemukan yang sangat akut dalam etnis dan keyakinan disinyalir memerankan fungsi memperlambat integrasi menuju komunitas kawasan. Kendati gagasan ideal yang sering dikumandangkan adalah bahwa kemajemukan seyogyanya tidak diidentikan dengan potensi konflik namun fakta menyuguhkan betapa keberagaman SARA telah menciptakan fragmentasi masyarakat kawasan ini.

Berbeda dengan masyarakat di Asia Tenggara, di Eropa masyarakat relatif lebih homogen, kendati terdapat aneka varian dalam keyakinan dan budaya namun sulit dipungkiri bahwa keberagaman di Eropa tidak seakut di Asia Tenggara.

#### **c. Intensitas Perang di masa lalu**

Perang tidak dapat dipungkiri merupakan alasan utama yang menanamkan rasa rindu mendalam pada benak umat manusia akan terciptanya dunia damai. Integrasi sebagai salah satu alternatif yang terbukti dapat menekan kemungkinan perang tak ayal menjadi jalan yang harus dilalui untuk mencapai dunia damai yang diidamkan. Membandingkan sejarah perang di kedua region, Eropa dan Asia Tenggara, jelas berbeda. Kendati perang juga terjadi di Asia Tenggara dengan intensitas yang tidak kecil, perang di Eropa jauh lebih mematikan di lihat dari sisi negara yang terlibat, cakupan area dan kerugian, baik korban meninggal maupun materi.

Di Asia Tenggara, sebelum kehadiran Prancis dan Inggris, hubungan internasional diperankan

oleh kerajaan-kerajaan. Di daratan Asia tenggara, misalnya, ada kerajaan Vietnam, Siem (Thailand), Laos dan Khmer (Kamboja). Dua yang pertama merupakan kerajaan yang progresif dan ekspansionis sedang dua yang akhir merupakan kerajaan yang lemah dalam militer, walupun demikian Khmer (Kamboja) memiliki wilayah yang luas dan berpenduduk paling makmur. Sementara di daerah maritim ada kerajaan Sriwijaya yang bertempat di Sumatra Selatan dan Majapahit di Jawa Timur. Sriwijaya bahkan merupakan kerajaan yang maju perekonomian dan perdagangan sehingga tak heran kerajaan-kerajaan besar seperti China tertarik untuk menjalin hubungan dengannya. Setelah kedua kerajaan itu surut muncullah kerajaan Malaka yang juga memiliki perekonomian yang kuat.

Sementara di daratan, Khmer dengan kemakmuran dan wilayahnya yang luas serta aksesnya ke laut membuat dua kerajaan ekspansionis yang mengapit dari barat dan timur, Siem dan Vietnam menjadi semakin agresif. Dari barat Siem berupaya merebut daratan Khmer sementara Vietnam alih-alih membantu Khmer justru malah menusuk dari arah timur. Kesempurnaan daratan Khmer ternyata belum cukup memuaskan Siem, sehingga Shiem masih berupaya meluaskan ekspansinya ke barat dengan menggempur Burma (Myanmar) dan ke selatan dengan menginvasi Malaka.

Intensitas perang di Asia Tenggara mereda setelah Prancis dan Inggris mendarat ke Asia Tenggara, namun setelah perang Vietnam usai (1975) Vietnam kembali meneruskan invasinya ke Kamboja. Kalau perang Vietnam (1975) merupakan wujud

perpanjangan kepentingan Amerika dan Uni Soviet maka invasi Vietnam ke Kamboja muncul dari sifat agresifitas Vietnam<sup>8</sup>.

Sementara di sisi lain, Eropa merupakan kawasan yang "kenyang" dengan perang. Dua perang dunia di abad dua puluh yang memiliki efek global berporos di Eropa. Dengan melibatkan Inggris, US, AS, Cina, Jerman, Itali, Jepang serta memporak porandakan tidak hanya Eropa namun juga Asia Tenggara, Timur Tengah, Mediteriana serta Afrika perang ini memakan korban hingga sedikitnya 50 juta jiwa.

Selanjutnya perang yang sedikit lebih kecil, perang dunia I (1914-1918) melibatkan Austria, Jerman, Turki, Bulgaria, Rusia, Perancis, Inggris, Kanada, Italia, Amerika Serikat. Dengan kerusakan parah yang tersebar di Eropa, Afrika, Timur Tengah, Kepulauan Pasifik dan Cina. Sementara korban nyawa manusia tidak kurang dari angka 40 juta.

Selain dua perang mematikan itu, perang Napoleon (1799-1815) tak kalah mengerikannya. Daratan Eropa menjadi ajang pertumpahan darah yang memilukan. 3.250.000-6.500.000 jiwa menjadi korban perang ini dengan sedikitnya tiga negara terlibat, yakni Prancis, Inggris, Rusia.

Fenomena perang di Asia Tenggara tidak sebanding kadar destruktifnya bila dibandingkan dengan perang di Eropa, daratan Eropa menjadi ajang perang dunia I dan II yang merupakan perang terbesar sepanjang

---

<sup>8</sup> Disadur dari Cipto, Bambang (2003), *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: teropong Terhadap Dinamika, Realitas dan Masa Depan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 9-13.

sejarah umat manusia sehingga tak ayal jika pengaruh psikologis yang dimunculkan perang Eropa terhadap semangat integrasi bangsa Eropa jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan pengaruh psikologis perang Asia Tenggara terhadap semangat integrasi di Asia Tenggara. Semangat integrasi Eropa (yang juga bisa dimaknai sebagai tingginya harapan untuk menghindari perang) bisa di lihat dari jumlah organisasi regional yang ada di Eropa. Hingga, setidaknya, hingga tahun 1989 saja misalnya di Eropa ada sedikitnya 17 organisasi internasional yang melibatkan 23 negara<sup>9</sup>, sementara di Asia Tenggara pada tenggang waktu yang tidak terlampau jauh hanya ada sedikitnya 4 yaitu SEATO, ASA, MAPHILINDO dan ASEAN pada tahun 1967, itu saja SEATO didirikan untuk mendukung kepentingan Amerika dalam mencegah pengaruh komunisme Uni Soviet di Asia Tenggara. Kemudian ASA dan MAPHILINDO hanya melibatkan 4 negara.

Keyakinan bahwa integerasi regional berkorelasi positif dengan semakin tereduksinya intensitas perang, sejalan dengan argumentasi Dosen *Holistic Education Center Universitas Fujen Liang*, Chong Min yang telah menjelaskan bahwa, sasaran utama didirikannya Uni Eropa (juga tentunya organisasi-organisasi regional lainnya) adalah berharap menghindari perang dan mengukuhkan perkembangan demokrasi<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Maso'ed, Mochtar (1989) *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisis*, Pusat antar Universitas, Studi Sosial Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal 175.

<sup>10</sup> 50 Tahun Uni Eropa , alat tua dan tantangan baru.

Perang di kawasan Asia Tenggara, kendati tentu, bukan bersekala kecil namun efek destruksinya belum bisa menanamkan pada benak masyarakat Asia Tenggara rasa rindu yang kuat untuk berintegrasi mewujudkan masyarakat Asia Tenggara. Masyarakat Asia Tenggara tidak se paham dan se mengerti masyarakat Eropa akan bahayanya perang. Indikator paling kasat mata barangkali fakta bahwa integrasi<sup>11</sup> di Eropa jauh lebih solid dibanding di kawasan melayu.

#### **d. *Political will* para rezim berkuasa**

Ada sejumlah faktor yang membuat mengapa rezim-rezim di Asia

[http://indonesian.rti.org.tw/indonesian/special/Perspektif/Perspektif\\_17.htm](http://indonesian.rti.org.tw/indonesian/special/Perspektif/Perspektif_17.htm), diakses Sabtu, 12 Desember 2009, Pukul 12:42 WIB

<sup>11</sup> Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa kuat negara-negara dalam suatu kawasan terintegrasi adalah dengan melihat prosentase nilai ekspor intra regional terhadap total ekspor regional tersebut. Semakin tinggi nilai eksportnya maka semakin kuat interdependensi antar negara dalam region itu, demikian pula sebaliknya semakin kecil prosentasi nilai ekspor intra regional terhadap total ekspor suatu regional, semakin lemah tingkat keterikatan antara negara-negara dalam kawasan itu. Pada tahun 1970, Masyarakat Eropa (ME) memiliki angka 50 untuk prosentase nilai ekspor intra regional terhadap total ekspor regional Eropa, di tahun yang sama ASEAN hanya memiliki angka 21%. Sepuluh tahun kemudian ME masih unggul dibanding ASEAN, sementara ASEAN 18%, ME 56%. Pola yang sama juga berlaku untuk dekade berikutnya (1990) dengan perbandingan 51% untuk ME dan 19% untuk ASEAN, Mansfield, E. D. & H. V. Milner (1997), *The Political Economy of Regionalism*, Columbia University Press, New York, hal: 172.

Lima belas tahun kemudian (2005) tingkat perdagangan intra Uni Eropa mencapai 67,3% dari total perdagangan organisasi regional itu. Di tahun yang sama tingkat perdagangan intra ASEAN masih berada di bawah Eropa (Uni Eropa) dengan hanya 22,1% dari total perdagangan organisasi negara-negara Asia Tenggara itu. Luhulima, CPF (2008), *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*, Pustaka Pelajar dan P2P-LIPI, Jakarta, hal 122.



tenggara berpotensi untuk menggajal terciptanya masyarakat Asean. Sejumlah karakter yang terdapat pada rezim-rezim Asia tenggara, seperti: (1) *korup*, lihat Indonesia yang menempati urutan ke 5 di ASEAN dan 111 di dunia (versi *Transparency International Indonesia/ TII*); (2) berada pada fase *transisi demokrasi*, bahkan ada yang *otoriter* lihat saja Myanmar misalnya, karena otoriter maka; (3) memiliki prestasi yang buruk dalam penegakan HAM; (4) memiliki respon yang lemah terhadap aspirasi warga Negara, lihat kasus "cicak Vs buaya" di Indonesia, nampak betapa respon pemerintah pada desakan warga Negara sangat lemah, di Myanmar respon junta terhadap tekanan akar rumput di tingkat domestik dan aneka tekanan di tingkat regional dan bahkan global terkait dengan kasus Aung San Su Kyi pun tidak jauh beda, rezim bersifat konserfatif, menolak aneka perubahan yang mereduksi rasa nyaman para penguasa.

Karakter-karakter tersebut berimplikasi pada terciptanya rezim yang sejenis pada level regional Asia Tenggara. Karakter konserfatif dan anti dialog dengan masyarakat pun mengkristal, permasalahan paling kasat mata yang dapat di tunjuk adalah sikap Filipina, Singapura, Burma, Kamboja, dan Laos yang telah menunjuk sendiri perwakilan masyarakat sipil dalam forum dialog dengan 10 pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke 15 di Hun Hin (2009). Peristiwa tersebut mengindikasikan ketidak relaan para pemimpin ASEAN untuk secara terbuka berdialog dengan posisi seimbang dengan warga Negara. Rezim Asia Tenggara telah menyadari adanya

gerakan arus bawah yang mengusik kekuasaan mereka.

Indikator lain yang menunjukkan betapa rezim-rezim politik domestik telah mentransformasikan diri secara kolektif menjadi rezim regional yaitu prinsip non-interfensi yang sangat diagung-agungkan oleh Negara-negara di kawasan ini. Sejatinya prinsip tersebut didesain sebagai metode untuk melanggengkan rezim-rezim politik domestik dari aneka gangguan campur tangan asing.

Polarisasi inilah yang menyulitkan ASEAN mentransformasikan diri dari *state oriented* menuju *people oriented*, sehingga rasanya impian "Komunitas ASEAN" semakin jauh panggang daripada api. Singkatnya, aneka pernyataan, program, rencana untuk menggapai masyarakat ASEAN menjadi kehilangan relevansi dengan ranah inderawi terutama justru disebabkan oleh ketiadaan kemauan politik para pemimpin serta rezim-rezim yang bercokol di Asia Tenggara.

### 3. Kesimpulan dan preskripsi

Komunitas regional tidak hanya membutuhkan pra kondisi maupun seting yang memungkinkan komunitas terbangun dengan solid, *political will* pemegang kebijakan Negara-negara Asia Tenggara memiliki peran kunci dalam hal ini. Seberapa solid suatu komunitas sangat ditentukan oleh seting masyarakat dengan aneka karakternya, seting geografis dengan beragam variannya, maupun seting sejarah dengan bermacam pernak perniknya, namun demikian sebagaimana telah

diuraikan sebelumnya, bahwa aneka potensi tersebut belumlah cukup untuk memicu terciptanya suatu komunitas pada tingkat regional. Masih ada faktor lain yang menempati peran kunci, yaitu: *political will* rezim-rezim berkuasa.

Melihat kemungkinan terwujudnya secara solid komunitas ASEAN 2020 apalagi 2015, dari perspektif seting-seting tersebut, nampaknya sangat sulit bagi ASEAN untuk mencapainya. Langkah paling mungkin untuk mengawali transformasi menuju komunitas ASEAN yang solid adalah meyakinkan—setidaknya kepada para pemegang otoritas di Negara-negara Asia Tenggara—betapa komunitas regional akan membawa aneka keuntungan tidak hanya bagi Negara-negara Asia Tenggara namun lebih jauh adalah bagi masyarakat raya Asia Tenggara, baik dalam ekonomi, politik, HAM, lingkungan teknologi serta masih banyak lagi beragam kemungkinan yang dapat dicapai dengan sangat memuaskan melalui metode “komunitas regional”, sehingga harapannya dapat menumbuhkan kesadaran politik dan, pada akhirnya nanti, *political will* para pemimpin bangsa-bangsa Asia Tenggara.

#### Daftar Pustaka

- Cipto, Bambang (2003), *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: teropong Terhadap Dinamika, Realitas dan Masa Depan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Capece, Guendalina *Att all.* (2009). “Online Communities Serving Territorial Communities: The M8 Case Study”. *9th Global Conference on Business & Economics* (October 16-17, 2009 Cambridge University, UK).
- Jemadu, Aleksius (2008), *Politik Global: dalam Teori dan Praktek*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Luhulima, CPF (2008), *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*, Pustaka Pelajar dan P2P-LIPI, Jakarta.
- Mansfield, E. D. & H. V. Milner (1997), *The Political Economy of Regionalism*, Columbia University Press, New York.
- Mas'ood, Mohtar (1989), *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi*, Pusat antar Universitas, Studi Sosial Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Smith, M. K. (2001) 'Community' in *the encyclopedia of informal education*, <http://www.infed.org/community/community.htm>, diakses pada Senin 2 November 2009, pukul 13:05 WIB.
- 50 Tahun Uni Eropa , alat tua dan tantangan baru. [http://indonesian.rti.org.tw/indonesian/special/Perspektif/Perspektif\\_17.htm](http://indonesian.rti.org.tw/indonesian/special/Perspektif/Perspektif_17.htm) diakses Sabtu, 12 Desember 2009, Pukul 12: 42 WIB.